

2020



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji Syukur kehadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap kementerian lembaga dan satuan kerja mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang dibuat berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

Penetapan rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini bertujuan sebagai pedoman atau dasar dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan tahun 2020 yaitu sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 kepada masyarakat

Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini, Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman kepada Rencana Strategi Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, pencapaian kinerja tahun 2019.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini, semoga kita semua dapat bekerja sama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah di tahun 2020 ini dengan baik.

Tenggarong, 2020
Kepala Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara

SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
BAB I. PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	3
BAB II. RUMUSAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN	8
2.1 Visi	8
2.2 Misi	10
2.3 Tujuan dan Sasaran	11
BAB III. KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN	33
3.1 Strategi Dan Kebijakan	33
3.2 Program dan Kegiatan	
36	
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggung jawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini disusun mengacu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 serta berdasarkan Peraturan Menteri

Negaradan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang , mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2016 tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksana kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari :

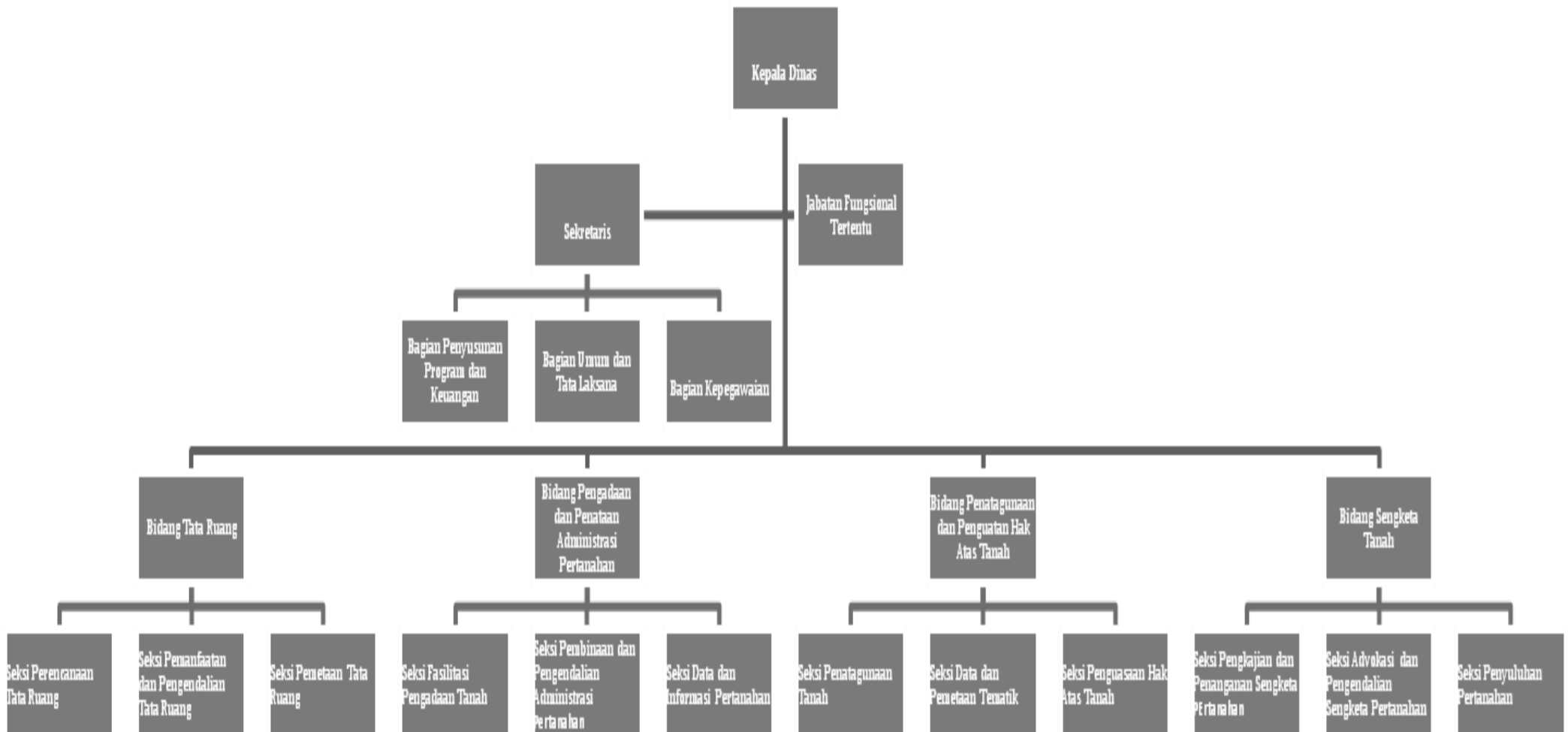
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Sub Bagian Kepegawaian, dan
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 - Seksi Pemetaan Tata Ruang
4. Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, membawahkan :
 - Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
 - Seksi Data dan Informasi Pertanahan
5. Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah, membawahkan :
 - Seksi Penatagunaan Tanah
 - Seksi Data dan Pemetaan Tematik
 - Seksi Penguatan Hak Atas Tanah
6. Bidang Sengketa Tanah, membawahkan :
 - Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan
 - Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan
 - Seksi Penyuluhan Pertanahan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara



BAB II

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016.

Perumusan Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Urgensitas dari penetapan tujuan sebagai bagian dalam penyusunan sebuah Rencana Strategis merupakan bentuk dari pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah yang secara ideal ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Dari tujuan yang telah ditetapkan kemudian dikembangkan kepada sasaran yang akan direalisasikan.

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah :

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan;
2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pertanahan;
3. Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan Profesional Di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Meningkatnya Penatusahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan;
3. Meningkatnya perencanaan. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Meningkatnya penyediaan data dan informasi pembangunan yang *up to date* dan akurat.

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Output / Outcomes				
				2017	2018	2019	2020	2021
Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	45	70	75	80	85
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pertanahan	Meningkatkan Tertib Pengelolaan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan	Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara	64,29	95,83	96	100	100

			Meningkatkan kepemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat	8,7	54,65	65	75	100
	Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	0	1	30	6	1

BAB III

KOMPONEN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1.1 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang, sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaian dari program/kegiatan, serta kelompok indikator kinerja. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen-komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada

tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

**Sasaran dan Indikator Kinerja Tahunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020**

Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2020	Keterangan
Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	80	
Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan	Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara	100	
	Meningkatnya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat	75	
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	6	

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel :
Rencana Kinerja Tahun 2020

TUJUAN1 : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan						
SASARAN STRATEGIS 1 :Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.						
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	Pagu Anggaran(Rp)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	80	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.897.849.527,74
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Rekening	232.099.980,00
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit	49.999.999,98
				Penyediaan alat tulis kantor	50 Jenis	70.000.000,00
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis 35000 lembar	20.000.000,00
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2604 Eksemplar	7.812.000,00
				Penyediaan bahan logistik kantor	5 Jenis	1.500.000,00

				Penyediaan makanan dan minuman	100 kotak 30 Dos	10.000.000,00
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	12 Kali	372.997.500,00
				Penataan Arsip Perangkat Daerah	5 Unit	99.626.666,00
				Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	53 Orang	1.009.813.381,76
				Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran	2 Kegiatan	24.000.000,00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.124.954.509,00
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6 Unit 2000 Liter	58.278.615,00
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10 Unit	20.000.000,00
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	1 Gedung	726.675.894,00

				Pengadaan meubelair	135 Unit	250.000.000,00
				Pemeliharaan rutin / Berkala Jaringan / Instalasi Air, Listrik dan telpon	1 Paket	70.000.000,00
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur			157.470.000,00
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	156 Stel	145.470.000,00
				Pengadaan Kartu Identitas Pegawai	133 Buah	12.000.000,00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			227.000.000,00
				Bimbingan Teknis Pertanahan dan Penataan Ruang	10 Orang	100.000.000,00
				Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur		
				Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	1 Inovasi	75.000.000,00
				Penyusunan Data Base Kepegawaian	9 Dokumen	52.000.000,00
				Penyusunan Dokumen Kepegawaian		

			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			384.448.799,76
				Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	9 Dokumen	52.200.000,00
				Penyusunan data dan informasi	4 jenis Data	24.000.000,00
				Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Laporan	276.947.200,00
				Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan BMD	31.301.599,76
TUJUAN 2 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pertanahan						
SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Penatausahaan,Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan						
	1. Meningkatnya kepemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat	75	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			35.076.552.500,00
				Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kukar	500 Persil	3.000.000.000,00
				Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum		
				Pengadaan Lahan Akses Jalan Masuk Menuju Pelabuhan Jongkang	0,4 Ha	1.500.000.000,00
				Pengadaan Lahan Pasar Mangkurawang	1,5 Ha	22.000.000.000,00

				Pengadaan Lahan Pasar Bukit Biru	2,5 Ha	8.000.000.000,00
				Penyusunan dan Updating Database Pertanahan	41%	269.170.000,00
				Pembinaan, Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa	18 Kec	307.382.500,00
				Fasilitasi Perubahan Penggunaan Lahan	30 Dokumen	200.000.000,00
			Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			946.034.535,46
	2. Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara	100		Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	135 Kasus	396.034.535,46
				Penyuluhan Hukum Pertanahan	18 Kec	350.000.000,00
TUJUAN 3 : Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang						
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang						
			Program Perencanaan Tata Ruang			22.179.620.000,00
	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	6		Pendampingan Proses Persetujuan Substansi RTRW Kab.Kutai Kartanegara	2 Dokumen	269.620.000,00
				Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Dokumen	

				Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah Perkotaan	2 Dokumen	
				Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah Perkotaan Kecamatan Kenohan	2 Dokumen	1.300.000.000,00
				Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah Perkotaan Kecamatan Muara Wis	2 Dokumen	1.300.000.000,00
				Penyusunan rdtr, klhs, dan koreksi perpetaan rdtr kawasan perkotaan kembang janggut	2 Dokumen	1.500.000.000,00
				Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah Perkotaan Kota Bangun	2 Dokumen	1.100.000.000,00
				Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah Perkotaan Kec. Tabang	2 Dokumen	1.500.000.000,00
				Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Kutai kartanegara	1 Dokumen	350.000.000,00

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	1 Dokumen	
				Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Samboja	2 Dokumen	600.000.000,00
				Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Anggana	2 Dokumen	600.000.000,00
				Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Marangkayu	2 Dokumen	600.000.000,00
				Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Muara Kaman	2 Dokumen	600.000.000,00
				Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Muara Badak	2 Dokumen	600.000.000,00
				Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Muara Muntai	2 Dokumen	600.000.000,00
				Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Tenggarong Seberang	2 Dokumen	600.000.000,00
				Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Sanga Sanga	2 Dokumen	600.000.000,00

				Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Tenggarong	2 Dokumen	600.000.000,00
				Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Sebulu	2 Dokumen	600.000.000,00
				Kajian Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pedesaan	2 Dokumen	600.000.000,00
				Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Muara Jawa	2 Dokumen	600.000.000,00
				Kajian Pemanfaatan Ruang Pasca Tambang	2 Dokumen	750.000.000,00
				Persetujuan Substansi dan Legislasi Raperda RTDR Kecamatan Loa Janan	2 Dokumen	600.000.000,00
				Masterplan RTH Kota Tenggarong	1 Dokumen	910.000.000,00
				Penyusunan Naskah Akademis, KLHS dan Persetujuan Substansi RTDR Kawasan Perkotaan Loa Kulu	2 Dokumen	900.000.000,00
				Penyusunan Kawasan Strategis Tenggarong, Tenggarong Seberang dan Loa Kulu	1 Dokumen	1.500.000.000,00

				Penyusunan Kawasan Strategis Segitiga KEKEMBANGAN (Kenohan, Kembang Janggut, Tabang)	1 Dokumen	1.500.000.000,00
				Penyusunan Kawasan Strategis Daerah Penyangga Ibu Kota Negara	1 Dokumen	1.500.000.000,00
			Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang			9.876.000.000,00
				Fasilitasi dan Identifikasi Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang dan Pelanggaran Ruang	1 Dokumen	276.000.000,00
				Kajian Pemukiman Diatas Air Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	
				Kajian Kelayakan Kawasan Industri di Kecamatan Kota Bangun	1 Dokumen	1.000.000.000,00
				Kajian Kelayakan Kawasan Industri di Kecamatan Loa Janan	1 Dokumen	1.000.000.000,00
				Kajian Pertimbangan Teknis Alih Fungsi Lahan Kawasan Migas ke Kawasan Perumahan dan Fasilitas Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen	750.000.000,00

				Kajian Pertimbangan Teknis Alih Fungsi Lahan Kwasan Migas ke Kawasan Perumahan dan Fasilitas Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Anggana	1 Dokumen	750.000.000,00
				Kajian Pertimbangan Teknis Alih Fungsi Kawasan Migas ke Kawasan Perumahan dan Fasilitas Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Sanga-Sanga	1 Dokumen	750.000.000,00
				Kajian Pertimbangan Teknis Alih Fungsi Lahan Kawasan Migaske Kawasan Perumahan dan Fasilitas Umum di kabupaten Kutai Kartaengara Kecamatan Muara Badak	1 Dokumen	750.000.000,00
				Kajian Penataan Kawasan Permukiman Teluk Dalam	1 Dokumen	750.000.000,00
				Kajian Penataan Kawasan Sungai Mangkurawang	1 Dokumen	750.000.000,00
				Kajian Penataan Kawasan Sungai Tenggarong	1 Dokumen	900.000.000,00
				Kajian Tipologi Sengketa Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	850.000.000,00

				Kajian Pemukiman Di Atas Air	1 Dokumen	1.100.000.000,00
				Pendampingan Proses Penyusunan Perda Instrumen Pengendalian Sekitar PSN Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	1 Dokumen	250.000.000,00
JUMLAH						71.869.929.871,96

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 ini merupakan komitmen Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good' governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean' government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.